

IMPLEMENTASI PROGRAM PKK BIDANG PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BANDUNGSEKARAN KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK

Nuraini Kusuma Andriyani¹, Bayu Aulia Priyantomo², Mulus Sugiharto³, Muhammad Abu Rizal Bahri¹, Shalasa Rafika Putri³

^aUniversitas Wijaya Putra, Indonesia

^{*}(nurainikusumaandriyani@uwp.ac.id¹), (bayuaulia@uwp.ac.id²),

(mulussugiharto@uwp.ac.id³),

ABSTRAK

Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan merupakan program yang bergerak untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pendidikan generasi pemuda di Desa Bandungsekar. Dalam pelaksanaan program ini diperlukan partisipasi dari masyarakat Bandungsekar agar program ini terlaksana dengan baik, sementara untuk masyarakat Desa Bandungsekar sendiri sangat minim dengan dunia literasi bahkan rendahnya tingkat pendidikan karena Desa Bandungsekar merupakan salah satu desa kecil yang ada Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan dari program PKK bidang pemberdayaan pendidikan di Desa Bandungsekar, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan case study, teknik pengumpulan data dengan purposive sampling dengan jumlah responden enam orang dan tahapan penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian program PKK menunjukkan bahwa implementasi sudah tercapai akan tetapi belum terlaksana secara maksimal dimana sosialisasi belum dilaksanakan bagi masyarakat Bandungsekar dalam bidang pemberdayaan pendidikan. Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pendidikan masih minim, masyarakat Bandungsekar lebih memilih untuk bekerja di usia muda dan tidak ingin melakukan pendidikan karena menurut mereka pendidikan belum menjamin kehidupan masyarakat sementara bekerja sebagai petani dan pedagang sudah pasti menjamin kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara efektif dan efisien. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah dapat menciptakan support dan partisipasi aktif masyarakat terkait dengan program PKK bidang Pendidikan. Selain itu dari penelitian ini ditargetkan untuk dapat membuat prosiding seminar nasional sehingga akan mengeksplor secara luas pada masyarakat tentang Implementasi Program PKK Bidang Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bandungsekar Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Kata kunci: Implementasi;PKK; Pemberdayaan ;Pendidikan; Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan gerakan nasional menuju pembangunan masyarakat yang sedang berkembang, yang pengelolaannya dimulai dari dan kembali ke masyarakat. Anggota PKK sendiri adalah yang sudah menjadi ibu-ibu dan yang sudah menikah. Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan perempuan menjadi figur publik dan memberikan pengaruh serta teladan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Menurut [1] pedoman dibuat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistematis, dimulai dari pengembangan dan pelatihan. Hal ini terkait dengan kebijakan kepala desa dalam membuat program untuk masyarakat. Program yang dibuat merupakan program

PKK yang dipimpin oleh perempuan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013. Gerakan program PKK dilaksanakan dalam 10 program besar. Itu adalah: 1. Penghayatan dan Pengamatan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, dan 10. Perencanaan sehat. Berdasarkan 10 poin tersebut, seluruh item akan diterapkan dan diterapkan di seluruh kabupaten, kelurahan, kelurahan, dan desa. Namun pada kasus Desa Bandungsekar, 10 program tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan, melainkan hanya dilaksanakan secara individual. Salah satu program yang dilakukan di Desa Bandungsekar adalah gotong royong generasi muda yang membersihkan jalan dan selokan sebulan sekali. Dilanjutkan dengan pelatihan dan pemberian keterampilan berupa sosialisasi kepada anak usia dini 9 hingga 12 tahun. Di Desa Bandungsekar, program kesehatan seperti Posyandu yang dilaksanakan sebulan sekali dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Pemberdayaan masyarakat kini menjadi fokus pembangunan nasional Indonesia. Penguatan masyarakat dalam pembangunan dilakukan sewaktu-waktu dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Kegiatan pemberdayaan ini dapat terlaksana apabila masyarakat ikut serta dalam pembangunan sosial yang dilakukan. Menurut [2] pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan didorong oleh perekonomian dengan sistem terbuka tradisional mengenai variabel eksternal: manusia dan lingkungan.

Dalam hal pendidikan ini tentu peran keluarga terutama orang tua sangat diperlukan, sehingga dalam hal ini kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan demi terciptanya pengetahuan serta pemahaman anak betapa pentingnya pendidikan. Menurut [3] kesejahteraan keluarga merupakan tolak ukur yang sangat berpengaruh dalam pembangunan. Angka kemiskinan masyarakat Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dalam penelitian [4] mengatakan bahwa 4 tingkat kemiskinan juga berakibat dan berpengaruh dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Di Indonesia sendiri masih minim dan rendahnya tingkat pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat terkhusus untuk kaum wanita. Banyak yang beranggapan bahwa wanita tidak perlu untuk melakukan pendidikan tinggi karena akan kembali ke dapur, menjaga anak, mengurus rumah dan sebagainya. Padahal dalam hal pendidikan ini justru sangat menguntungkan bagi kaum wanita, disaat wanita berpendidikan wanita mempunyai kesempatan menciptakan generasi-generasi muda yang berkarakter baik dan penuh dengan wawasan, madrasah utama seorang anak adalah pada ibunya. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi wanita untuk menjadi wanita yang mandiri dan berpendidikan tinggi. Sehingga perlu adanya kesejahteraan untuk wanita agar angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang. Dengan begitu pemberdayaan pendidikan sangat perlu untuk diterapkan dan diperhatikan oleh Pemerintah. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu tempat untuk perempuan dalam mengembangkan kemampuan maupun potensi yang ada dalam dirinya secara mandiri demi mengatasi masalah yang ada dalam dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas hidupnya. Dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuan dari PKK adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera tanpa membeda-bedakan golongan, suku, ras, dan agama.

Keputusan pemerintah terkait program PKK ini sudah diakui dan diterapkan, keberhasilan PKK ini tidak dapat untuk dipungkiri karena sebagian pengurusnya adalah kaum wanita. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [5] dengan hasil penelitian program

PKK lebih kuat dan tinggi nilai sosialnya pada bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan di desa simpang baru. Penelitian serupa juga dilakukan oleh [6] dengan hasil kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan program PKK berdasarkan pelatihan kemampuan yang dilakukan pada bidang komputer dalam hal pendataan dan pencatatan agar tidak tertinggal jauh di Desa Patikraja. Penelitian yang dilakukan di Desa Kayuambon menyatakan bahwa Program PKK sudah berperan sangat aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus kaum wanita yang berkategori kurang mampu di Desa Kayuambon Lembang [7]. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh [8] menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan perlu semangat dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk kesejahteraan dari program PKK.

Berdasarkan penelitian terdahulu akan menjadi bahan dasar untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait lokasi dan fokus teori yang digunakan. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut pandangan Edward III dengan judul penelitian Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bandungsekar, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan dan pelaksanaan kebijakan dalam membangun pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang minim akan pengetahuan. Berdasarkan data tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sejumlah 149,75. Tentunya hal ini mempengaruhi tingkat pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik terutama dalam hal pendidikan. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan dikarenakan masyarakat lebih cenderung memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Terkait permasalahan yang terjadi Desa Bandungsekar adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Untuk mengatasi permasalahan di Desa Bandungsekar mengenai kurangnya tingkat pendidikan di Desa Bandungsekar membuat masyarakat lebih banyak memutuskan untuk bekerja daripada melanjutkan studinya, karena kesejahteraan masyarakat akan berkembang dengan baik jika pemahaman dan pengetahuan masyarakatnya lebih luas lagi dengan menuntut ilmu lebih baik lagi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan dan pelaksanaan Program PKK pada bidang pemberdayaan pendidikan bagi masyarakat Bandungsekar.

METODE

Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan bentuk case study adalah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pemahaman maupun perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia. Subyek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi atau masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan

Menurut Edward III implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika memenuhi empat indikator yaitu: Sumber Daya, Komunikasi, Sikap Pelaksana dan Struktur organisasi. Berikut penjabaran implementasi program PKK bidang pemberdayaan pendidikan berdasarkan pandangan dari Edward III; Komunikasi merupakan salah satu variabel yang sangat berpengaruh dalam implementasi dari kebijakan yang dibuat. Implementasi bisa berjalan secara efektif jika tujuan dan isi dari program itu bisa tersampaikan dengan jelas dan tepat pada sasaran. Hal ini bisa dilihat betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah kebijakan yang sudah dibuat agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sangat erat kaitannya dengan program pemberdayaan pendidikan pada program PKK di Desa Bandungsekar. Yang ingin penulis

lihat pertama kali ialah faktor komunikasi diantara setiap stakeholders yang ikut serta atau terlibat dalam program pemberdayaan pendidikan program PKK di Desa Bandungsekar. Berdasarkan pengamatan dan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi dalam implementasi program PKK bidang pemberdayaan pendidikan di Desa Bandungsekar kurang baik. Jika diurutkan dari pernyataan ketua TIM PKK bidang pemberdayaan pendidikan yang menyatakan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi terkait kegiatan pelatihan menjahit pada tahun 2017 yang dilaksanakan selama 2 minggu. Program ini awalnya berjalan dengan baik akan tetapi seiring berjalannya waktu pelatihan berhenti karena masyarakat kurang berminat. Kemudian ditahun 2018 kreativitas masyarakat dimulai dengan pelatihan membuat kue oleh ibu-ibu PKK. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan sosialisasi pelatihan bibit dan mengadakan bibit kangkung untuk dilakukan penanaman di Bandungsekar. Dan untuk tahun 2020 sampai 2021 tidak dilakukan program pemberdayaan pendidikan karena dana desa disalurkan ke bantuan selama covid 19. Hal yang bisa dilakukan pada saat covid yaitu melakukan sosialisasi pertemuan seperti pengambilan raport anak-anak di sekolah dasar, pada saat orang tua atau wali murid yang mengambil raport anak-anak sedikit dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan untuk anak-anak generasi muda dan fokus sosialisasi ini lebih ke anak-anak usia dini. Jika menelaah informasi dari pernyataan masyarakat Desa yang menjadi narasumber menyatakan bahwa sosialisasi terkait program PKK pemberdayaan pendidikan ini ada dilakukan seperti menjahit akan tetapi tidak diteruskan sampai sekarang bahkan masyarakat juga tidak mengetahui dimana mesin jahit itu sekarang. Untuk itu komunikasi pada implementasi program PKK pemberdayaan pendidikan dikatakan belum berjalan secara efektif.

Komunikasi yang terjalin antara pihak Desa, Ketua PKK dan masyarakat belum berjalan dengan baik. Sosialisasi terkait pendidikan juga belum dilakukan bersama masyarakat hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat lebih aktif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berbondong-bondong untuk meneruskan usaha turun temurun tersebut. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke masyarakat setempat bahwa masyarakat Bandungsekar menjadi seorang petani karena orang tua sebelumnya juga petani dan sebagai wiraswasta. Karena Desa ini merupakan Desa kecil sehingga informasi yang didapatkan juga seadanya dan tingkat kereativitas pun masih sangat kurang. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusrina, 2017) terkait komunikasi yang disampaikan pada kebijakan ini pemberdayaan program PKK ialah dengan melakukan sosialisasi pelatihan dan pemberian modal usaha kepada masyarakat Kecamatan Tegal Barat. Sementara dalam penelitian ini komunikasi berupa pelatihan yang dilakukan baru sekali yaitu pada tahun 2019 sehingga hal yang dilakukan ini belum optimal.

1) Sumber Daya

Implementasi yang dikemukakan Edward III bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini Edward III mengatakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pada pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan dapat dilihat dari jumlahnya juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, aturan, perintah dari atasan (pemimpin). Sumber daya dalam penerapan ini terbagi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

2) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia harus ada ketetapan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Bandungsekarang dipimpin oleh beberapa aparatur Bandungsekarang, Sekdes, Kaur Pemerintahan Muhtadin, Kaur Pembangunan, Kaur Kestra, Bendahara, Kadus 1, Kadus 2 masing-masing mempunyai tugas dan fungsi penting di Bandungsekarang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada anggota PKK di Bandungsekarang bahwa sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat juga belum dilakukan karena minimnya informasi. Rata-rata masyarakat di Desa Bandungsekarang menempuh pendidikan terakhir SMA. Bahkan pengetahuan masyarakat terkait literasi atau sumber bacaan masih sangat minim. Pemuda masyarakat di Desa tersebut setelah selesai SMA langsung bekerja baik sebagai petani maupun sebagai wiraswasta dan untuk pemudi setelah selesai SMA kebanyakan memutuskan untuk menikah atau sebagai ibu rumah tangga. Skala kehidupan di Desa itu terus berputar seperti itu belum ada kemajuan, bahkan tingkat kreativitas pun masih sangat rendah. Sehingga dengan begitu sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk lebih memperdulikan atau melihat kondisi di Desa-desa terpencil.

Sikap Pelaksana

Pelaksanaan program PKK bidang pemberdayaan pendidikan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan untuk pelatihan-pelatihan juga belum optimal terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam hal ini ketua bidang pemberdayaan pendidikan juga belum ditetapkan ditahun 2021. Masih saling tunjuk menunjuk, hal ini sesuai dari informasi yang peneliti dapatkan saat menanyakan siapa ketua PKK di tahun 2021 ini. Sehingga untuk menyikapi hal ini ketua PKK periode sebelumnya seharusnya lebih cepat tanggap dalam menentukan siapa penerus selanjutnya yang akan membimbing program ini agar tidak terjadi kesalahan seperti saat ini. Pelaksanaan program PKK yang berpartisipasi di bidang pendidikan yang pertama tentunya Kepala Desa, aparat Bandungsekarang dan ibu-ibu PKK dan tentunya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sangat sulit diterapkan di Bandungsekarang karena para pemuda pemudi lebih cenderung untuk mencari uang yang lebih menjamin kehidupan karena mereka beranggapan pendidikan, kreativitas juga tidak menghasilkan uang. Dalam mengambil sebuah keputusan tentunya para pelaksana yang bersangkutan saling bermusyawarah dulu tidak bisa langsung melakukannya begitu saja, apalagi berkaitan dengan program pemberdayaan pendidikan. Bandungsekarang merupakan desa kecil sehingga sangat sulit untuk mengubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri apalagi mempengaruhinya untuk melakukan pendidikan kreativitas. Kami sebagai pihak pelaksana hanya mampu melakukan sosialisasi dan akan berusaha memberikan bantuan berupa beasiswa jika masyarakat itu sendiri mau melakukan pendidikan ke luar daerah. Mungkin dengan adanya satu orang yang mau dan mempunyai pemikiran yang berbeda bisa jadi hal ini menjadi pendorong untuk pemuda-pemudi selanjutnya. Masalahnya sampai saat ini masyarakat Bandungsekarang tidak ada yang melanjutkan kreativitas yang sudah diberikan seperti pelatihan-pelatihan pada tahun sebelumnya apalagi study nya sampai ke jenjang strata 1 (S1). Mereka hanya stop di pendidikan terakhir yaitu SMA. Sehingga tenaga kerja sebagai PNS pun di Desa ini belum ada. Dan sosialisasi yang dilakukan hanya berfokus pada anak usia dini mulai dari 9-12 tahun. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pathony, 2019) pelaksana dalam kebijakan program PKK menjalankan semua aturan dan persyaratan yang ditetapkan. Respon dan kognisi implementator terhadap kebijakan yang dijalankan mendapatkan nilai yang baik di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Seputih Rahman. Sementara dalam penelitian ini para implementator juga mendapat nilai baik dari

masyarakat hanya saja masyarakatnya yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan program PKK ini.

Struktur Birokrasi

Aparatur Bandungsekar basedasarkan tugas dan fungsi di Bandungsekar Kecamatan Balongpangang Kabupaten Gresik yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan Bandungsekar, membina masyarakat, menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat penyelenggaraan dan sebagainya. Sekreataris Desa bertugas dalam ketatausahaan administrasi, pelaksanaan urusan umum, keuangan dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Kaur pemerintah dipimpin yang bertugas sebagai pembinaan masalah pertanahan dan batas Bandungsekar, mengendalikan dan mengevaluasi ketentraman dan ketertiban, pemantau kegiatan sosial politik, dan sebagainya. Kaur Pembangunan yang bertugas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Bandungsekar, pembangunan bidang ekonomi, SDA, pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Kaur Kestra yang bertugas dalam pelaksanaan ketatausahaan dalam hal surat menyurat, penataan administrasi perangkat Bandungsekar, penyiapan rapat dan sebagainya yang terlibat dalam urusan umum dan perencanaan. Bendahara yang bertugas dalam pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan administrasi keuangan, dan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Program PKK ini bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan serta keadilan gender, kesadaran hukum dan lingkungan, menjadi relevan untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga. Kesejahteraan keluarga disini ialah keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera lahir dan batin (Alámin, 2017; Muzaqi et al., 2020). PKK bertujuan untuk lebih menumbuhkan, mengarahkan, menghimpun dan membina keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan peran PKK juga diharapkan mampu memberikan penguatan perempuan dalam bidang ekonomi sehingga perempuan memiliki usaha alternatif yang akan melepaskannya dari tekanan ekonomi di tengah kesulitan-kesulitan krisis yang membelitnya. Sejalan dengan temuan tersebut, Sunaryo (2020) mencatat bahwa untuk berbagai kesulitan yang dihadapi, banyak perempuan-perempuan lebih memilih segera menikah dalam usia muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bandungsekar basedasarkan 4 indikator yaitu sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien. Dimana program pemberdayaan pendidikan ini belum berjalan dengan baik, sosialisasi yang dilakukan juga masih sangat kurang, penyampaian informasi juga masih kurang dan para pelaksana kebijakan juga belum maksimal. Sehingga dalam hal ini juga menjadi sorotan penting untuk pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat desa kecil. Dalam hal sumber daya masyarakat setempat hanya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada. Berdasarkan hasil wawancara bahwa benar adanya Desa kecil ini sangat minim pengetahuan tentang dunia literasi dan pendidikan masih jauh tertinggal. Pernyataan-pernyataan yang peneliti dapatkan dibuktikan dengan dokumentasi baik data sekunder maupun data primer yang peneliti dapatkan. Tingkat keberhasilan PKK dalam pemberdayaan pendidikan rumah tangga adalah

meningkatnya pengetahuan dan wawasan rumah tangga mandiri dengan mengembangkan serta memajukan kreativitas dan pendidikan yang merupakan faktor nomor satu untuk lebih ditingkatkan lagi sementara pendapatan ekonomi rumah tangga Bandungsekarang masyarakat lebih memilih berbondong-bondong bekerja yang sudah jelas menjamin kehidupan mereka sementara pendidikan belum tentu bisa menjamin kehidupan mereka. Sehingga dengan mindset tersebut perlunya program PKK bidang pemberdayaan pendidikan ini untuk lebih ditingkatkan lagi agar diterima di masyarakat tersebut. Pelatihan-pelatihan kreativitas yang dilakukan dengan fokus dan serius untuk mempengaruhi minat masyarakat. Saran yang dapat diberikan untuk program PKK bidang pemberdayaan pendidikan di Bandungsekarang yaitu: (1) Program PKK ini perlu untuk benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, (2) Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan perlu untuk ditingkatkan lagi terkhusus dalam melakukan sosialisasi baik tentang kreativitas maupun pendidikan kepada masyarakat, (3) perlu diterapkannya pelatihan-pelatihan kepada anggota dan masyarakat tentang dunia literasi agar masyarakat Bandungsekarang tidak semakin tertinggal. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan kembali untuk melihat penerapan program PKK di Bandungsekarang karena penelitian yang dilakukan peneliti saat ini dalam keadaan covid 19 sehingga tidak melihat secara langsung pelatihan-pelatihan yang dilakukan bahkan informasi masih sangat kurang terkait sumber daya finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Xie, H., Wen, J., & Choi, Y. (2021). How the SDGs are implemented in China—A comparative study based on the perspective of policy instruments. *Journal of Cleaner Production*, 291, 125937. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125937> (Citra, 2017), dst
- [2] Sunaryo, A. (2020). Implementasi Pemberdayaan Pendidikan Melalui 10 Program Pokok PKK. *Journal Public Service and Governance*, 1(2), 253–278. (Muzaqi et al. , 2020)
- [3] Satria, E., Yusnita, I., & Sari, A. E. (2020). Peningkatan Kinerja Pemasaran UMKM Melalui Dimensi Kewirausahaan di Kabupaten Kerinci. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.177>
- [4] Retno, E. K. (2011). Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2004, 1–20.
- [5] Landriany, E. (2014). Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2, 82–88. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 112).
- [6] Al'amin, A. (2017). Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). *JOM FISIP*, 4(2), 1–15.
- [7] Wanti, L. P., & Tripustikasari, E. (2019). Pelatihan Komputer Dasar Bagi Kader PKK dan Posyandu Di Desa Patikraja. *Indonesian Journal Of Civil Society*, 1(1), 17–23.
- [8] Nurfadillah, S. U. (2019). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UP2K-PKK Di Desa Kayuambon Lembang. *Jurnal Comm-Edu*, 2(1), 90–100.
- [9] Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *JIP*, 8(1), 62–71.
- [10] Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Inklusif. *Journal Publicuho*, 3(3), 381. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.14010>

- [11] Citra, I. P. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484>
- [12] Destri Rahmawati. (2019). Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 79–91. <https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.34>
- [13] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- [14] Usman Sunyoto. 2004. “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- [15] Syaukani dkk. 2004 : 295. Artikel Definisi tentang Implementasi menurut ahli (www.dosenpendidikan.com)
- [16] Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media Menurut Edi Suharto (2005:60)
- [17] Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja
- [18] Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan masyarakat*, Yogyakarta : Teras, 2009
- [19] Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- [20] Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- [21] Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- [22] Sipahelut, 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- [23] Budi Sutedjo. “Perancangan & Pembangunan Sistem Informasi”, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006
- [24] Polit, D. & Beck, C. (2004). *Nursing research: Principle and methods*. (7th edition). Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- [25] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [26] Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- [27] Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- [28] Anas Sudijono (1996), *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [29] Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- [30] Hadari, Nawawi, 2005, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- [31] Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta
- [32] B. Matthew Miles dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- [33] Burhan Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [34] Deddy Mulyana. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- [35] Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press